



RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR

TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAKASSAR
Website : satpolpp.makassarkota.go.id



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 2708/050.13/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);

21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan.:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR: 2708 / 050.13 / TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
 2024.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
5.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
6.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
8.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
10.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
11.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
12.	Dinas Sosial Kota Makassar
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
14.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar
15.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
21.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
22.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
23.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
24.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
25.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
29.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
34.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
35.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
36.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
37.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
38.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
39.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
40.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
43.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
44.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
45.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
46.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
47.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
48.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
49.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
50.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
51.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar

PARAF HIRARKIS	TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
KA. BIDANG BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
KA. SUBAG/ KA. SUBID	

WALI KOTA MAKASSAR,
[Signature]
MOH. RAMDHAN POMANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu.....	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	44
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	46
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	63
BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH	67
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan.....	67
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	68
3.3. Program dan Kegiatan.....	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	85
BAB V PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	32
2.. Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.....	45
3.. Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	53
4.. Tabel 2.4	Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.....	63
5. Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 Kota Makassar dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	75
6. Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024.....	86

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2024.

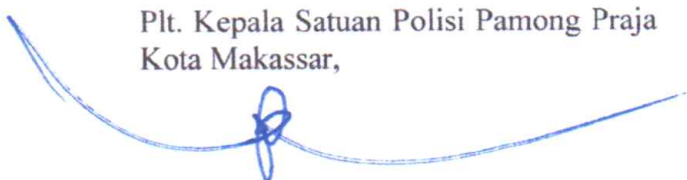
Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2024 adalah sebagai implementasi dari Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2024 ini berpedoman kepada Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma-norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa yang akan datang.

Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2024 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta dapat memotivasi meningkatnya kinerja bagi para Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Makassar, Juli 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar,



IKHSAN, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19740629 199403 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar T.A 2024 ini merupakan Acuan Perencanaan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Selama 1 (Satu) Tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026. Adapun Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana tahapan dan tatacara Penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah, dimana perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- b) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- d) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- e) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
- f) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan

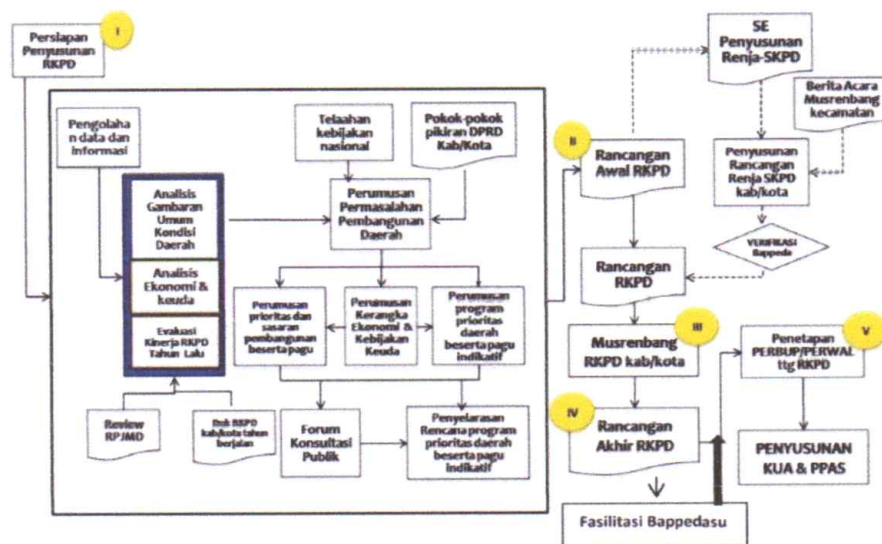
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan. Peraturan Walikota tentang RKPD dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). KUA dan PPAS disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Selain proses penyusunan RKPD yang bersifat normatif tersebut, penyusunan RKPD juga harus memperhatikan pendekatan-pendekatan perencanaan untuk menjamin kedalaman perencanaan dan keterukuran

target-target kinerja. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: teknokratik, partisipatif, politis; dan atas-bawah dan bawah-atas Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan: holistik-tematik, integratif; dan spasial. Dalam penyusunan RKPD harus juga memuat indikator kinerja yang dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (time-bound), yang disingkat SMART.

Proses perumusan RKPD Kota Makassar Tahun 2023 dapat dilihat pada bagan alir berikut:

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003

RKPD menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi dasar penyusunan KUA dan

PPAS yang dibahas Bersama DPRD untuk selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

- Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
24. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259 Tahun 2020, Lembaran Lepas Sekretaris Negara Nomor 27);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Linmas dalam Penangan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Satuan Polisi Pamong Praja;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan Hak – Hak Asasi Manusia;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Momor 590);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).

45. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
46. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2021 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja RENSTRA dan RPJMD Kota Makassar tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahun 2024 yang operasional:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar untuk memastikan pencapaian target tahunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan RPJMD Kota Makassar tahun 2024.
- b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Satpol PP Kota Makassar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mencakup :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan yang terkait kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 yang merupakan kelanjutan dari Renja 2023

BAB V. PENUTUP

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2022 dan serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2021-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar melaksanakan program, kegiatannya dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dibebankan pada APBD tahun 2022, sebesar Rp 36.396.932.868.00,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan Realisasi atau serapan anggaran sebesar Rp 33.373.505.703,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah) Persentase serapan anggaran 91,69% dan realisasi kinerja 97% terangkum dari 2 program 10 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan ini telah disediakan anggaran belanja masing-masing program yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dianggarkan sebesar Rp 11.216.526.868,- dengan Realisasi serapan anggaran Rp 9.378.018.385,- atau 83,61 % dengan realisasi kinerja 96,10%. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satpol PP dengan cara : Pendidikan dan pelatihan formal; Pembinaan fisik mental, etika

dan disiplin; Pengadaan pakaian dinas lapangan; Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur; Peningkatan disiplin Aparatur. Beberapa Faktor Penghambat yaitu : Terbatasnya Jumlah SDM satpol PP kota makassar khususnya untuk penempatan di sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Tindak lanjut dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lebih memaksimalkan SDM yang ada, menganggarkan bimbingan teknis berdasarkan tugas dan fungsi dan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini di anggarkan sebesar Rp 25.180.406.000,- dengan Realisasi serapan anggaran Rp 23.995.487.318,- atau 95,29% dengan realisasi kinerja 98,10%. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan adalah dukungan SDM yang cukup memadai, Adanya kegiatan Penyuluhan Perda dan Peraturan Walikota kepada masyarakat Kota Makassar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Pelanggaran Perda dan Perwali, Adanya kegiatan patroli rutin wilayah di seluruh kecamatan kota makassar untuk meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan baik, Adanya kebijakan pimpinan untuk membentuk Tim Penegakan Perda dan Perwali, serta Hubungan koordinasi dengan Instansi terkait telah terjalin dengan baik. Beberapa Faktor Penghambat yaitu Kurangnya personil yang akan bertugas untuk mengawasi luasnya wilayah kota makassar, Kurangnya Koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan keamanan, tidak adanya fasilitas bagi petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ditiap kelurahan, Kurangnya tingkat kesadaran Masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan Perwali, serta kurangnya kesepahaman hukum oleh lembaga–lembaga Non Pemerintah / LSM terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Berbagai kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dengan senantiasa meningkatkan koordinasi dan menggali sumber – sumber pendanaan lain selain APBD Kota, guna peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan kendala yang dihadapi diatas.

TABEL 2.1
Perbandingan Antara Target RENSTRA dengan Target dan Realisasi Kinerja 2022

RENSTRA 2021-2026			RENUA 2022				
PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	100 %	100 %
	2. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%		2. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	96,88%	96,88%
	3. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%		3. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	91,42%	91,42%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dok	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dok	15 Dok	93,75 %

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	100%	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	90%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	90%	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	67,33%	67,33%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan	-	-	-	-

			Pemerintah Daerah					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	100 %	100 %	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 %	98,33 %	98,33 %	98,33 %
Program Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	1.Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada 2. Persentase Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum yang dapat diselesaikan 3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 % 100 % 100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	1.Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada 2. Persentase Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum yang dapat diselesaikan 3. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 % 100 % 100 %	97,14% 97,14% 100%	97,14% 97,14% 100%	97,14% 97,14% 100%

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	80 %	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	80 %	97,14 %	97,14 %
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar yang ditegakkan	83 %	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar yang ditegakkan	83 %	100%	100 %
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Peningkatan SDA yang mengikuti diklat PPNS	2 Orang	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Peningkatan SDA yang mengikuti diklat PPNS	2 Orang	2 Orang	100 %

Realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 33.373.505.703,- dari total anggaran Rp. 36.396.932.868,- dengan persentase 91,69 % yang terdiri dari 2 program, 11 kegiatan, dan 40 Sub Kegiatan. Anggaran belanja masing-masing program dapat dijabarkan sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.216.526.868,- dengan Realisasi Keuangan sampai Triwulan ke IV sebesar Rp 9.378.018.385,- Persentase Serapan anggaran 83,61% sedangkan capaian kinerja sebesar 96,10% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 189.514.500 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 107.050.520,- Persentase Serapan anggaran sebesar 56,49%. Sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 100%. Sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah dianggarkan sebesar Rp 65.175.500,- dengan Realisasi Keuangan Rp 36.132.450,- atau 55,44%. Capaian kinerja 5 Dokumen dari target 5 Dokumen.
 - b) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 12.000.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp 10.762.650,- atau 89,59%. Capaian kinerja 1 Dokumen dari target 1 Dokumen.
 - c) Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp 10.492.650,- atau 87,44%. Capaian kinerja 1 dokumen dari target 1 dokumen.
 - d) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 10.762.650,- atau 89,69%. Capaian kinerja 1 dokumen dari target 1 dokumen.
 - e) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 10.762.650,- atau 89,69%. Capaian 1 dokumen dari target 1 dokumen.

- f) Evaluasi Kinerja perangkat daerah pada dianggarkan sebesar Rp. 76.339.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp 28.137.470,- atau 36,86%. Realisasi 6 dokumen dari target 6 dokumen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 8.224.311.293,- dengan Realisasi Keuangan sampai sebesar Rp 7.064.120.690,- atau 86,68%. sedangkan capaian Kinerja Pada sebesar 100% Kegiatan Ini mempunyai sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada DPA Perubahan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 7.721.590.981,- dengan jumlah PNS 61 orang. realisasi keuangan sampai Triwulan ke IV sebesar Rp. 6.565.735.345,- atau 85,03% capaian kinerja 100%.
- b) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 282.720.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 272.960.000,-atau 96,55%. Realisasi 100% dengan indikator 27 orang.
- c) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 180.000.000,- atau 100 %. Capaian kinerja 100% dengan indikator 10 orang.
- d) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 7.942.500,- atau 79,43%. Realisasi 12 dokumen dari target 12 dokumen.
- e) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.18.000.312,- dengan realisasi keuangan Rp. 14.330.250,- atau 79,61%. Realisasi 2 dokumen dari target 2 dokumen.
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 13.852.325,- atau 69,26%. Adapun realisasi kinerja sebanyak 14 dokumen dari target 14 dokumen.

- g) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 9.300.270,- atau 77,50%. Adapun realisasi kinerja sebanyak 12 dokumen dari target 12 dokumen.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada tahun 2022 mempunyai Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 14.001.450,-. Atau 70,01% sedangkan capaian Kinerja Pada sebesar 100%. Kegiatan ini mempunyai sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada tahun 2022 alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.424.700,- atau 68,49%. Realisasi kinerja 1 dokumen dan target 1 dokumen.
- b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 4.534.700,- atau 90,69%. Realisasi kinerja 1 dokumen laporan barang milik daerah dari target 1 dokumen.
- c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.042.050,- atau 60,42%. Realisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 553.016.075,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 506.565.212,- atau 91,60%. Sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 100 %. Kegiatan Ini mempunyai Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp. 365.416.075,- atau 98,99%. realisasi kinerja pengadaan pakaian dinas sebanyak 509 pasang dari target 509 pasang.
- b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.

168.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 127.715.027,- atau 76,02%. Realisasi 14 orang dari target 14 orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- c) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 19.600.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 17.118.390,- capaian 70 orang dari target 70 orang.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 568.323.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 455.006.273,- atau 80,06%. sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 67,33%. Capaian kinerja rendah karena 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terealisasi. Kegiatan Ini mempunyai Sub Kegiatan Sebagai Berikut :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 5.058.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 5.058.000,- atau 100%.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 353.605.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 274.909.600,- atau 77,54%. capaian realisasi kinerja 80%. adapun yang tidak realisasi adalah belanja komputer all in one sebanyak 2 unit karena barang tidak tersedia sampai akhir tahun.
 - c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,-. Kegiatan tersebut tidak terealisasi karena tidak ada pihak ketiga.
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 13.320.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000,- atau 54,05%. Realisasi kinerja 12 eksamplar dari target 12 eksamplar.
 - e) Fasilitas kunjungan tamu pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 22.340.000,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 5.400.000,- atau 24,17%.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 164.000.000,- dengan

realisasi Keuangan sebesar Rp. 163.155.173,- atau 99,48%.
Realisasi kinerja 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 285.800.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 122.633.640,- atau 42,91% sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 100 % Kegiatan ini mempunyai Sub Kegiatan Sebagai Berikut:

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000,- dengan realisasi keuangan pada sebesar Rp. 17.633.640,- atau 48,98%. Realisasi kinerja 100% dengan ketersediaan jasa komunikasi internet selama 1 tahun.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 249.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 105.000.000,- atau 42,03%. Realisasi kinerja 100% dengan capaian indikator ketersediaan pelayanan umum kantor selama 1 tahun.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.355.562.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 1.108.640.600,- atau 81,78% sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 98,33% Kegiatan Ini mempunyai Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp. 42.630.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.831.650 atau 93,44%. Realisasi kinerja 100% dengan indikator 1 unit.

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.253.762.000,- dengan realisasi Keuangan sebesar Rp 1.009.638.950,- atau

80,53%. Realisasi kinerja 95% diukur dari ketersediaan dan kondisi kendaraan dinas operasional.

✓ **Faktor Pendukung**

1. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam penyerapan anggaran adalah dukungan SDM yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran sehingga terlaksananya beberapa kegiatan sesuai jadwal.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan baik

✓ **Faktor Penghambat**

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 67,33%.
2. Pengadaan Belanja Komputer All in one 2 unit tidak realisasi karena sudah tidak tersedia produk yang memenuhi nilai TKDN sampai akhir tahun.
3. Fasilitas kunjungan tamu hanya realisasi 24%. disesuaikan kunjungan tamu yang datang.

✓ **Tindak Lanjut**

1. Percepatan Pembuatan RUP untuk belanja modal di triwulan I.
2. Penyediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

- **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.180.406.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 23.995.487.318,- atau 95,29%. sedangkan capaian Kinerja sebesar 98,10% terdiri dari kegiatan sebagai berikut:**

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp. 24.548.873.000 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 23.424.677.433,- atau 95,42%. sedangkan capaian Kinerja sebesar 97,14%. Kegiatan Ini mempunyai Sub Kegiatan Sebagai Berikut:

- a) Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp 9.875.588.200,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 9.399.470.411,- atau 95,18%. Capaian kinerja 100%. Target kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi kewaspadaan dini potensi konflik sebanyak 300 orang, jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan sebanyak 300 orang, serta melibatkan TNI-POLRI dan Anggota Satpol PP dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- b) Penindakan atas gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp 12.423.286.800,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.824.992.512,- atau 95,18%. Capaian kinerja 100% dengan indikator melibatkan TNI-POLRI dan Anggota Satpol PP dalam penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada. Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan dan terindikasi oleh Satpol PP Kota Makassar sebanyak 209 kasus dan ditindaklanjuti/diselesaikan sebanyak 209 kasus, termasuk penanganan massa aksi unjuk rasa.
- c) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan ketertiban Umum pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp 900.000.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 900.000.000,- atau 100 %. Sebanyak 300 anggota satlinmas telah diberdayakan dan telah mendapatkan peningkatan kapasitas.
- d) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota dianggarkan Rp. 20.028.000,- dengan realisasi Rp. 190.000. belanja tersebut adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

sebesar Rp. 190.000. Kegiatan ini tidak terlaksana karena ada kesalahan kode rekening belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- e) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dianggarkan sebesar Rp 563.445.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 556.416.510,- atau 98,75%. Realisasi kinerja 100% diukur dari jumlah Satlinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 300 dari target 300 orang, jumlah anggota korps musik gita praja yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 70 dari target 70 orang serta anggota Satpol PP yang mendapatkan pembinaan fisik, mental, etika dan disiplin.
 - f) Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketentraman dan ketertiban Umum pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp 766.525.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 743.608.000,- atau 97,01%. Realisasi kinerja 85,71%. adapun yang tidak terealisasi adalah belanja Tenda Regu 4x6 sebanyak 3 unit disebabkan karena pagu tidak mencukupi.
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 556.533.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 509.559.885,- atau 91,56%. Sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 100% Kegiatan Ini mempunyai sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp 107.555.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 104.474.240,- atau 97,14%. Realisasi kinerja 100% diukur dari jumlah peserta sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota makassar sebanyak 300 orang dari target 300 orang. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 kali.
 - b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota pada tahun 2022 mempunyai

anggaran sebesar Rp 62.492.000,- dengan Realisasi Keuangan Rp 40.656.945 atau 65,06%. Realisasi kinerja 100% diukur dari intensitas pengawasan atas kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati sebanyak 600 jam dari target 600 jam. dengan jumlah pengawasan sebanyak 716 kasus. Jumlah perda dan perwali yang akan ditegakkan tahun 2022 sebanyak 17 perda dan 6 perwali.

- c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp 386.486.000,-. Realisasi Keuangan Rp 364.428.700,- atau 94,29%. Capaian kinerja sebesar 100% diukur dari kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah sebanyak 250 kasus dari target 250 kasus.
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 75.000.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 61.250.000,- atau 81,67%. Sedangkan capaian kinerja sebesar 100% dengan indikator dari jumlah PPNS yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 2 orang. Kegiatan ini mempunyai sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS pada tahun 2022 mempunyai anggaran sebesar Rp 75.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 61.250.000,- Realisasi kinerja 100% diukur dari capaian 2 orang yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karier PPNS dari target 2 orang.

Solusi dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Intensitas Monitoring dan Evaluasi kinerja mulai dari internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
2. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan SKPD Kota Makassar terutama dalam penanganan PK5 dan anak jalanan.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam menunjang tugas utama dalam hal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti pengadaan Alat Komunikasi Handy Talky, Sepeda untuk Satpol PP Pedesterian.
4. Pembinaan fisik, mental dan etika Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
5. Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, perlengkapan/inventaris kantor yang baik dan standar, seperti peralatan komputer, alat transportasi, dan beberapa mesin lainnya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas organisasi.

✓ **Faktor Pendukung**

1. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam penyerapan anggaran adalah dukungan SDM yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran sehingga terlaksananya beberapa kegiatan sesuai jadwal.
2. Adanya kegiatan Penyuluhan Perda dan Peraturan Walikota kepada masyarakat Kota Makassar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Pelanggaran Perda dan Perwali,
3. Adanya kegiatan patrol rutin wilayah di seluruh kecamatan kota makassar untuk meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Adanya ketersediaan anggaran dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah,
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan baik,
6. Adanya kebijakan pimpinan untuk membentuk Tim Penegakan Perda dan Perwali
7. Hubungan koordinasi dengan Instansi terkait telah terjalin dengan baik.

✓ **Faktor Penghambat**

1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat

Kabupaten/Kota tidak terlaksana karena kesalahan kode rekening belanja.

2. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi 6 unit dari target 9 unit. persentase 66,67%. Belanja pengadaan tenda regu 4x6 tidak realisasi karena pagu tidak mencukupi, karena ada kenaikan harga produk akibat kenaikan harga BBM.

✓ **Tindak Lanjut**

1. Peningkatan SDM melalui diklat berdasarkan tugas dan fungsi
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Penganggaran Diklat PPNS sebanyak 4 orang untuk tahun 2023.
4. Penganggaran Diklat Dasar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar di Tahun 2023.
5. Menyusun rencana aksi sebagai alat kontrol capaian kinerja SKPD.

Untuk rincian target dan realisasi capaian kinerja dan anggaran renja tahun 2022 dan pencapaian RENSTRA SKPD Tahun 2021– 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 (T.C-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil RENJA SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Tahun berjalan) Kota Makassar
 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarahan Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7+9	11 = 10/4
	Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan dasar									
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	100%	100%	33.33%	33.33%	33.33%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	96.88%	96.88%	96.88%	24.51%	24.51%	24.51%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	91.42%	91.42%	91.42%	28.98%	28.98%	28.98%

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	91 dokumen	15 dokumen	16 dokumen	15 dokumen	95,75 %	2 dokumen	17 dokumen	16,48%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	1 dokumen	8 dokumen	25,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	20,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	20,00%
Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	12,5%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	0 dokumen	6 dokumen	20,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	25%	25%	25%

Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	20,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	33%	%	20%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 unit	-	-	-	-	-	-	0%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1167 pasang	-	509 pasang	509 pasang	100%	0 pasang	509 pasang	43%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 orang	15 orang	14 orang	14 orang	100%	6 orang	20 orang	28%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	35%	0%	20%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor yang disediakan	100 paket	0 paket	20 paket	20 paket	100%	0 paket	20 paket	20%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 paket	-	5 paket	4 paket	80%	4 paket	9 paket	36%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 paket	-	-	-	-	-	-	0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	0 paket	1 tahun	20%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60 eksampiar	12 eksampiar	12 eksampiar	12 eksampiar	100%	6 Eksampiar	18 eksampiar	25%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan Minum yang disediakan	6250 paket	1000 paket	1250 paket	520 paket	41%	0 paket	520 paket	8,32%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 kali	27 kali	28 kali	28 kali	100%	12 kali	40 kali	22,85%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	20%	20%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	6 laporan	1 tahun	20,00%
	Penyediaan Layanan Umum Kantor	Jumlah Publikasi/Penyebarluasan Informasi Pencegahan Peraturan Daerah	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	0 laporan	1 tahun	20,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	30%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 tahun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	20,00%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 tahun	62 unit	62 unit	100%	45 unit	62 unit	20,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	0 unit	1 tahun	20%
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	-	-	-	-	-	-
		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100%	97,4%	100%	100%	35,17%	35,17%	35,17%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	95%	100%	100%	50%	50%	50%
		Persentase jumlah data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	100%	80%	95%	80,42%	35,17%	65,21%	65,21%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik	1500 orang	300 orang	300 orang	100%	-	300 orang	20,00%
		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1500 orang	300 orang	300 orang	100%	-	300 orang	20,00%
		Pelibatan TNI/Polri dan Anggota Satpol PP dalam Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4060 orang	812 orang	812 orang	100%	91 kasus	812 orang	20,00%

❖ **Capaian Target Kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan Renja 2023 Triwulan 2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar**

Pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2023 dibebankan pada APBD Pokok Tahun 2023 sebesar Rp. 37.591.024.000,- namun pada triwulan ke 2 dilakukan parsial anggaran menjadi Rp. 37.683.929.500,- karena adanya kegiatan peringatan hari otonomi daerah yang dipusatkan di Kota Makassar.

Realisasi anggaran sampai bulan juni sebesar **39.97%** yang terdiri dari 2 program, 10 kegiatan, dan 41 Sub Kegiatan. Anggaran belanja masing-masing program dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan Rp. 11.605.983.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.104.172.137,-. Persentase serapan anggaran 35.36%.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan Rp. 26.077.975.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.958.501.000,-. Persentase serapan anggaran 42.02 %.

Rincian dari ke 2 (dua) program tersebut dijabarkan berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.605.953.700,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 4.104.172.137,- Persentase Serapan anggaran 35.36% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 mempunyai Anggaran sebesar Rp. 184.468.000 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 26.150.000,- Persentase Serapan anggaran sebesar 15.18%. Sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 4 dokumen dari target 16 dokumen.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun 2023 di Anggaran sebesar Rp 7.859.137.650,- dengan Realisasi Keuangan sampai sebesar Rp 3.335.350.828,- atau 42%.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada tahun 2023 mempunyai Anggaran sebesar Rp. 17.566.500,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 0.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada tahun 2023 mempunyai Anggaran sebesar Rp. 389.400.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 55.954.690,-. Sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 33.33 %.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2023 mempunyai Anggaran sebesar Rp 611.446.200,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 364.067.614,- atau 59%. sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 39%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2023 mempunyai Anggaran sebesar Rp 617.064.500,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 6.154.105,- atau 10% sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 20% Kegiatan ini mempunyai Sub Kegiatan Sebagai Berikut:
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan pada tahun 2023 mempunyai anggaran sebesar Rp 1.926.870.850,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 316.494.900,- atau 16.43% sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 55%.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat faktor pendukung keberhasilan kinerja dan faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam penyerapan anggaran adalah dukungan SDM yang memadai, baik sumber daya manusia

maupun sumber daya anggaran sehingga terlaksananya beberapa kegiatan sesuai jadwal.

Faktor Penghambat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

1. Beberapa kegiatan belum berjalan karena adanya kesalahan kode rekening belanja penyedia jasa surat menyurat sehingga dilakukan parsial 3.
2. Fasilitas kunjungan tamu belum ada realisasi makan minum karena menyesuaikan kondisi kunjungan tamu.
3. Penyedia jasa pelayanan umum kantor belum terlaksana seperti Belanja jasa tenaga ahli hukum, Pentahelix, PPID non asn karena belum ada SK.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp. 26.077.975.800,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.780.521.000,- atau 33.67%. sedangkan capaian Kinerja sebesar 29% terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.482.828.800 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 10.716.751.000,- atau 42.02%. sedangkan capaian Kinerja sebesar 42.89%.
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Walikota pada tahun 2023 mempunyai anggaran sebesar Rp 452.647.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 179.000.000,- atau 41%. Sedangkan capaian Kinerja pada sebesar 41%.
- Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota pada tahun 2023 mempunyai anggaran sebesar Rp 142.500.000,- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 62.750.000,-

atau 44.04%. Sedangkan capaian kinerja sebesar 50%. indikator dari jumlah Laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat faktor pendukung keberhasilan kinerja dan faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam penyerapan anggaran adalah dukungan SDM yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran sehingga terlaksananya beberapa kegiatan sesuai jadwal.
2. Adanya kegiatan Penyuluhan Perda dan Peraturan Walikota kepada masyarakat Kota Makassar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Pelanggaran Perda dan Perwali,
3. Adanya kegiatan patrol rutin wilayah di seluruh kecamatan kota makassar untuk meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Adanya ketersediaan anggaran dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah,
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana dengan baik,
6. Adanya kebijakan pimpinan untuk membentuk Tim Penegakan Perda dan Perwali
7. Hubungan koordinasi dengan Instansi terkait telah terjalin dengan baik.

Faktor Penghambat Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada dengan anggaran Rp. 150.000.000. sampai triwulan ke 2 ini belum ada realisasi anggaran karena tidak ada warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau mengalami cedera

atas dampak dari penegakan perda. Kendala lain adalah belum ada petunjuk teknis ganti rugi materil atas dampak penegakan perda dan perkara sehingga akan dilakukan perubahan rincian sub kegiatan ini dalam rangka koordinasi ke kemendagri terkait pelayanan ganti rugi SPM trantibumlinmas.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota. realisasi kinerja adalah kegiatan pelaksanaan hari OTDA dan Koordinasi Pelaksanaan Hut Satpol PP di Kota Makassar. Realisasi 2 dokumen dari target 12 dokumen. Faktor penghambat karena jadwal kegiatan pengamanan untuk satpol pp yang padat. Kegiatan ini akan dilaksanakan triwulan ke 3 ini.
3. Adanya kesalahan rekening belanja peningkatan kapasitas Satlinmas sehingga dilakukan parsial 3 perubahan sub rincian objek.
4. Jumlah orang yang mengikuti Diklat PPNS sebanyak 2 orang dari target 4 orang. Faktor penghambat tidak terlaksananya adalah 1 orang sedang bersamaan dengan jadwal naik haji. Sehingga dijadwalkan ulang pada bulan oktober 2023 mendatang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebanyak 764 pegawai terdiri dari 61 pegawai PNS dan 703 pegawai Non PNS. Pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban umum didukung dengan sarana kendaraan operasional sebanyak 61 unit terdiri dari 12 unit kendaraan roda empat, 7 unit kendaraan roda enam dan 42 unit kendaraan roda dua.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD menggunakan Indikator Sasaran Pelayanan SKPD dimana pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 2021-2026 Sasaran Satpol PP ialah Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Kinerja persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, **Sustainable Development Goals (SDGs)**.

Tabel 2.2 (T.C-30)

Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		CATATAN ANALISI
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terlaksananya Penegakan Hukum Peraturan Daerah	-		80%	83%	85%	85%	81%	100%	100%	100%	
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-		85%	85%	87%	87%	100%	100%	100%	100%	

Terlaksananya penegakan hukum peraturan daerah tahun 2022 mencapai 100%. Capaian tersebut diukur dari jumlah perda dan perwali yang ditegakkan sebanyak 23 dari target 23 perda dan perwali. Penegakan perda tersebut terdiri dari 250 kasus. Sedangkan untuk Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2022 mencapai 100%. Capaian tersebut diukur dari jumlah kasus yang diselesaikan sebanyak 209 kasus dari total 209 kasus ketentraman dan ketertiban umum.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi maka dapat ditentukan beberapa isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yaitu:

- 1) Pemilu Serentak Tahun 2024
- 2) Implementasi Perda dan perwali yang belum optimal
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan daerah dan peraturan walikota khususnya dalam hal ketertiban umum, seperti masih banyaknya pelanggaran perda oleh pedagang kaki lima (PK5) yang menggunakan daerah milik jalan.
- 4) Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pencegahan ketertiban umum.
- 5) Penanganan aksi unjuk rasa/demo di Kantor Pemerintahan.
- 6) Pelaksanaan regulasi yang mengatur tugas beberapa OPD, seperti dalam penanganan anak jalanan belum diatur OPD mana yang menjadi tanggung jawab.

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan

menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, karena semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan tetap tercapai dengan kualifikasi sangat baik yang ditunjukkan oleh pencapaian output, outcome dan capaian indikator kinerja utama SKPD.

Inovasi

Bedasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar mempunyai inovasi dibidang teknologi informasi dalam rangka membantu kegiatan penegakan peraturan daerah dan atau peraturan walikota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar akan meluncurkan aplikasi pengaduan pelanggaran Perda/Perwali. Aplikasi tersebut adalah "EROJAMA" (Elektronik Report Jaga Makassar). Adapun tujuan dari aplikasi tersebut adalah

- a. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam melaporkan atau aduan pelanggaran perda.
- b. Membantu instansi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dalam hal manajemen dan pertanggung jawaban aduan pelanggaran perda.
- c. Memudahkan monitoring pimpinan dalam penanganan pelanggaran perda
- d. Mendukung perwujudan makassar kota metaverse.

Dalam Penerapannya, Aplikasi Erojama akan mengirim notifikasi ke bidang terkait dan dibantu oleh tim PPNS, Tim Paronda (Patroli Roda Dua), Tim Sapujagad (Tim penegakan Peraturan Daerah).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada hakekatnya, permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Secara umum pemerintah Kota Makassar telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut

belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mengurangi pelanggaran Perda.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Makassar yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Makassar, baik secara represif non yustisi dan pro yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk memberikan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

Selain itu penggunaan bahu jalan protokol sebagai tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, seperti Jalan Pettarani dan Hertasing karena menimbulkan kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan pengunjung Pedagang Kaki Lima (PKL). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan melanggar Perda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan secara persuasif dengan mengutamakan sentuhan hati.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, juga diperlukan kontribusi, partisipasi, dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat.

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya dengan mengisi tabel sebagai berikut :

- a. Dinamika Internasional
 - 1) Peningkatan Kasus Radikalisme
- b. Dinamika Nasional
 - 1) Pemilu Serentak Tahun 2024
 - 2) Peningkatan Kasus Radikalisme

- 3) Peningkatan kasus penyalahgunaan Obat-obat terlarang
- 4) *Human Error*
- 5) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

c. Regional/Daerah

- 1) Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- 2) Pemilu Serentak Tahun 2024
- 3) Penyalahgunaan fungsi Pedestrian Oleh Pedagang Kaki Lima (PK5)
- 4) Keterbukaan Informasi Pelayan Publik
- 5) Anak Jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya (PMKS)
- 6) Penyalahgunaan Aset daerah, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- 7) Gangguan Kantrantibmas di kawasan destinasi wisata

Kota Makassar merupakan Kota Terbesar di Kawasan Timur Indonesia merupakan pusat kegiatan perekonomian dan pendidikan dengan Konsekuensi timbulnya berbagai persoalan-persoalan perkotaan yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial. Kesemuanya itu memerlukan pencermatan dan penanganan sistematis dan antisipatif yang bersifat tangkal dini.

Untuk menghadapi dan menangani persoalan gangguan Ketentraman dan Ketertiban tersebut diatas, juga sangat bergantung seberapa baik kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Oleh karena itu dengan perangkat Peraturan yang tersedia yang dipandang memadai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar diharapkan dapat proaktif dalam mengantisipasi gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dimaksud. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah yang diharapkan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan PAD Kota Makassar Menjadi PAD 1,7 T riliun pada Tahun 2020.

Masalah Internal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain :

1. Terbatasnya Kemampuan SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar bila diperhadapkan pada dinamika, Kompleksitas dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) sehingga optimilisasi kinerja masih jauh dari apa yang diharapkan.
2. Minimnya jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga penanganan masalah penertiban dan Pengamanan serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara tuntas baik berupa tindakan prepentif maupun represif.
3. Standarisasi pendidikan dan latihan kurang memadai baik menyangkut Kurikulum, metode dan waktu latihan sehingga belum sepenuhnya membekali kecakapan dan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan.
4. Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Operasional dalam berbagai bentuk perlengkapan belum memadai dan terbatasnya penyediaan Anggaran untuk penggadaannya oleh Instansi penentu kebijakan dalam sektor Anggaran.
5. Belum adanya dukungan aturan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban umum serta perlunya merevisi kembali beberapa Peraturan Daerah yang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini.

Adapun masalah Eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain:

1. Munculnya berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi terus menerus dari waktu ke waktu dengan Frekuensi dan Intesitas yang relatif cukup tinggi sehingga terdapat kerawanan sosial di berbagai tempat ;
2. Lemahnya koordinasi antar unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional dilapangan guna mengantisipasi

terjadinya Pelanggaran Peraturan Daerah secara dini dan untuk mengambil langkah lebih lanjut.

3. Lemahnya koordinasi antar unit kerja terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Guna Pengembangan SDM
4. Kurangnya kesepahaman Hukum oleh Lembaga-Lembaga non Pemerintah/ Lembaga sosial masyarakat (LSM) terhadap Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal, disamping tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar serta Isu-isu penting terkait Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kondisi tersebut diatas antara lain :

1. Perlunya penambahan personil disertai peningkatan wawasan SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota makassar dan PPNS melalui kegiatan diklat yang memadai terkait standart kurikulum dan metode penanganan dini, pemeriksaan dan penindakan (Prepentif dan Represif) terhadap pelaku gangguan trantibum dan Pelanggar Perda dan Peraturan Walikota;
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana disertai penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan ;
3. Perlunya dukungan aturan dan merevisi kembali beberapa Perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, menyangkut pemberian sanksi administrasi dan ketentuan pidana;

4. Peningkatan sistem koordinasi kemitraan antara Aparat Penegak Perda dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan perubahan yang telah disusun pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada tahun 2024 mengacu pada dokumen RKPD yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Berikut Tabel 2.3 (T.C-31) Review terhadap rancangan awal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 (T.C-31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan								
No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	40.360.280.191	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	40.360.280.191
		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	13.831.426.262		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	13.831.426.262
		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	352.280.286	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	352.280.286
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	152.591.410	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	152.591.410
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	19.626.650	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	19.626.650

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19.626.650	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19.626.650
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	19.626.650	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	19.626.650
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	19.626.650	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	19.626.650
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	101.182.276	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	101.182.276
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	90%	10.773.958.841	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	90%	10.773.958.841
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	10.156.552.930	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	10.156.552.930
Penyediaan Administrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	343.222.368	Penyediaan Administrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	343.222.368

Peleksanaan Tugas ASN	Peleksanaan Tugas ASN	Peleksanaan Tugas ASN	Peleksanaan Tugas ASN	Peleksanaan Tugas ASN	Peleksanaan Tugas ASN	Peleksanaan Tugas ASN	Peleksanaan Tugas ASN	Peleksanaan Tugas ASN	Peleksanaan Tugas ASN
Peleksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	180.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan peleksanaan akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Peleksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	11.139.450	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Peleksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	11.139.450	Koordinasi dan Peleksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.096.093	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.096.093	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	30.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	12 Laporan	21.218.000	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	12 Laporan	21.218.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12.730.000	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12.730.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terperuhnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	90%	27.425.769	90%	Terperuhnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	90%	27.425.769	Terperuhnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.425.769	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.425.769
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	501.808.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	501.808.000
Pengadaan Sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana pegawai	4 unit	80.000.000	Pengadaan Sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 unit	80.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	293 Paket	194.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	293 Paket	194.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	127.308.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	127.308.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	100 orang	50.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	100 orang	50.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 orang	50.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 orang	50.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	478.529.188	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	478.529.188
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	125.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	125.000.000
Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 paket	50.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 Paket	50.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	144 Dokumen	14.131.188	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	144 Dokumen	14.131.188
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.522.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.522.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	206.875.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	206.875.500
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 %	150.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 %	150.000.000

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	150.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	150.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	122.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	122.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 %	1.425.424.178	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 %	1.425.424.178
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1 Unit	57.858.091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1 Unit	57.858.091
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	66 Unit	1.304.792.634	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	66 Unit	1.304.792.634

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	49 Unit	62.773.453	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	49 Unit	62.773.453
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	26.528.853.929		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	26.528.853.929	
		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan					26.528.853.929			
		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan								
Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah dan Potensi Gangguan Ketertiban dan dan Ketertarikan Masyarakat	82%	25.934.023.214	Persentase Jumlah dan Potensi Gangguan Ketertiban dan dan Ketertarikan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah dan Potensi Gangguan Ketertiban dan dan Ketertarikan Masyarakat	82%	25.934.023.214
Prevention Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prevention Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyaluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Kasus	10.381.813.800	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyaluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Prevention Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyaluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Kasus	10.381.813.800

yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum yang Tersedia	4 Unit	410.539.807	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit	410.539.807
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	0	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	0
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	12.500.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	12.500.000
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	6 Laporan	77.134.856	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	6 Laporan	77.134.856
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	12 Laporan	66.297.762	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	12 Laporan	66.297.762

dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
371.830.597	371.830.597	371.830.597	371.830.597	371.830.597	371.830.597	371.830.597	371.830.597	371.830.597
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500	79.567.500
TOTAL								40.360.280.191

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dari penelaahan dilapangan mengenai Program dan Kegiatan yang dibuat juga memperhatikan dari usulan masyarakat yang didata oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar diantaranya : pengendalian keamanan dan kenyamanan dimana masyarakat meminta untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban umum, serta pengawasan dan penegakan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dengan adanya usulan dari masyarakat mengenai peningkatan patroli wilayah, sosialisasi peraturan daerah dan keputusan walikota.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilandasi Prinsip keselarasan merupakan salah satu pertanda dari sistem demokrasi yang hidup dan berkembang dengan baik. Pengambilan keputusan yang demokratis mengisyaratkan masyarakat yang terkena dari suatu kebijakan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Isu dan aspirasi masyarakat merupakan pangkal tolak dari perencanaan pembangunan menjadi mutlak, peran pemerintah memberdayakan masyarakat serta memfasilitasi suatu forum untuk berkomunikasi dengan publik.

Tabel 2.4 (T.C-32)

Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Makassar

N o	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan nasional diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Kota Makassar.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kota Makassar untuk tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebagai aparaturnya Penegak Peraturan Perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030.

Selain itu, perencanaan pembangunan dituntut untuk semakin berdasarkan pada upaya-upaya membudidayakan dan melestarikan potensi serta isu strategis setempat, Perencanaan Pembangunan harus bersifat lebih Strategis, langsung pada titik-titik potensial dengan berorientasi Program aksi yang berdampak cepat dan luas. Anggaran Belanja dan Pembangunan Daerah harus bertumpuh pada kepentingan publik dan mampu memberikan transparansi dan Akuntabilitas secara Rasional. Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengindikasikan semakin banyaknya dana di daerah diharapkan lebih

memantapkan terselenggaranya kemandirian dalam perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Prioritas Nasional Tahun 2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satpol Kota Makassar yang masih menjadi dasar acuan pembuatan Renja 2023-2024 berfokus pada :

1. Menunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan Penjabaran dari Misi dan Merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta jaminan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dalam beraktifitas”

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang ditetapkan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan Rencana Kinerja dan alokasi sumberdaya organisasi dalam Kegiatan atau Operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun kedepan Sasaran yang ditetapkan adalah :

“Terwujudnya Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat”

Hal tersebut diwujudkan melalui :

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah.

Upaya – upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dengan melakukan sosialisasi dan advokasi dengan tetap memberikan peluang kepada masyarakat sehingga tercipta rasa keadilan dan kebenaran dalam menjamin kepastian hokum, yang dapat terwujud.

2. Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan tugas-tugas dilapangan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Dalam upaya mewujudkan Ketentraman dan Kenyamanan dalam masyarakat, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus Mampu menempatkan Tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam membina masyarakat dan penyuluhan serta advokasi, Penggalangan masyarakat melalui para tokoh agama, budaya, adat, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam satu komunitas.

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pengorganisasian dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Bahwa upaya peningkatan fungsi perlindungan kehidupan masyarakat aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu menyerap aspirasi dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan demokratisasi yang berkembang sehingga kepekaan akan melahirkan kepedulian kedalam aspek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja mampu memeberikan pelayanan prima sesuai dengan Standart Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam berbagai aspek pembangunan yang dinamis, terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan.

4. Meningkatnya Kepekaan, Kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi masalah-masalah yang dapat mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Maraknya berbagai ancaman terhadap kesatuan bangsa dan keamanan nasional seperti terorisme, Inteloransi, Radikalisme dan kekerasan antar kelompok, merupakan ujian berat bagi para penyelenggara keamanan Negara penanggkalan,

pengungkapan dan penegakan Hukum atas ancaman-ancaman itu memang merupakan tugas dan wewenang aparaturnya Negara.

Tak ada pilihan lain, jika ingin aman dan nyaman, masyarakat harus diajak berpartisipasi menjaga kesatuan bangsa dan keamanan Nasional. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah mensinergikan tugas pengungkapan dan penegakan hukum itu dengan kebutuhan masyarakat, dalam wujud yang bernama kewaspadaan dini.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2024 merupakan kelanjutan Renja tahun 2023 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan arah kebijakan serta sasaran Prioritas rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahunan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Meliputi Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meliputi Sub Kegiatan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meliputi Sub Kegiatan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Meliputi Sub Kegiatan

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Meliputi Sub Kegiatan

- Peningkatan Sarana dan prasarana disiplin pegawai.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Meliputi Sub Kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi Sub Kegiatan
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Meliputi Sub Kegiatan :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Meliputi Sub Kegiatan :

- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.

- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Penyediaan Layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Meliputi Sub Kegiatan :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Meliputi Sub Kegiatan :

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Dari uraian tersebut diatas secara rinci rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3.1 (T.C-33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 Kota Makassar dan Prakiraan Maju Tahun 2025 berikut ini :

Tabel 3.1 (T.C-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 Kota Makassar
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Usuan / Bidang / Usuan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	Satuan Polisi Pamong Praja											41.004.216.469	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											41.004.216.469	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											41.004.216.469	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											13.896.396.327	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											362.248.692	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
1	05 01 2.01 0001	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas perencanaan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kalf/Desa	90 % 100 % 90 %	5 Dokumen	16 Dokumen		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	157.189.152
1	05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kalf/Desa	90 % 100 % 90 %	1 Dokumen	16 Dokumen		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.215.449
1	05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kalf/Desa	90 % 100 % 90 %	1 Dokumen	16 Dokumen		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.215.449
1	05 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kalf/Desa	90 % 100 % 90 %	1 Dokumen	16 Dokumen		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	20.215.449
1	05 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kalf/Desa	90 % 100 % 90 %	1 Dokumen	16 Dokumen		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.215.449

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terperuhnya Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 100 % 90 %	1 Dokumen	16 Dokumen	16.518.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.215.449	
1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terperuhnya Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 100 % 90 %	4 Laporan	16 Dokumen	12.448.400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.000.000	
1 05 01 2.02 0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terperuhnya Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 100 % 90 %	3 Laporan	16 Dokumen	53.971.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	104.217.744	
1 05 01 2.02 0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terperuhnya Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 90 % 100 %	61 Orang/bulan	90 %	7.647.517.312	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	10.461.249.517	
1 05 01 2.02 0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 90 % 100 %	12 Dokumen	90 %	308.160.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	353.519.039	
1 05 01 2.02 0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 90 % 100 %	12 Dokumen	90 %	308.160.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	353.519.039	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Praktiran Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Page Indikatorf (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
													Tolok Ukur	Target
1 05 01 2.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 90 % 100 %	1 Dokumen	90 %	180.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	180.000.000	
1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 90 % 100 %	2 Dokumen	90 %	11.178.700	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	11.473.633	
1 05 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 90 % 100 %	1 Laporan	90 %	21.705.300	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.668.976	
1 05 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 90 % 100 %	4 Dokumen	90 %	29.893.500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	40.000.000	
1 05 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 90 % 100 %	14 Laporan	90 %	30.872.800	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	21.854.540	

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Hasil Kegiatan						
1 05 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 100 % 90 %	20 Orang	488.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	131.127.240	
1 05 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 100 % 90 %	100 Orang	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000	
1 05 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 100 % 90 %	100 Orang	942.166.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000	
1 05 01 2.06 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 100 % 90 %	1 Paket	5.863.200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	
1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 100 % 90 %	4 Paket	400.520.500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	130.000.000	
1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 % 100 % 90 %	3 Paket	47.902.300	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	

Kode	Urutan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	100 % 90 % 90 %	12 Laporan	90 %	27.417.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.000.000
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	100 % 90 % 90 %	12 Laporan	90 %	285.750.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.095.516.900				1.468.196.903
1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	90 % 90 % 100 %	1 Unit	90 %	42.706.650	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.593.833
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	90 % 90 % 100 %	66 Unit	90 %	1.005.610.250	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	1.343.936.414
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	90 % 90 % 100 %	61 Unit	90 %	47.200.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	64.656.656
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERANGAN DAN KETERIBAN UMUM								33.511.812.620				27.107.820.142
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Keterterangan dan Keteriban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								32.914.910.920				26.495.144.507
1 05 02 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Keltetiban Umum serta Perlindungan Masyarakat/Kota												

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
1 05 02 2.01 0004	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum Yang Dapat Diselesaikan Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akbat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	82 %	223.947.820	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	122.276.332	
1 05 02 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat Temasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum Yang Dapat Diselesaikan Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akbat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	82 %	3.900.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	983.454.300	
1 05 02 2.01 0008	Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum Yang Dapat Diselesaikan Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akbat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat yang Dilengkapi Kapasitasnya	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1665 Orang	82 %	2.452.742.700	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1665 Orang	643.355.041	
1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum Yang Dapat Diselesaikan Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akbat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Keterlibatan dan Ketertarikan Masyarakat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	82 %	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Praktikan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
1 05 02 2.01 0016	<p>Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perdamaian dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p> <p>Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum Yang Dapat Diselesaikan Persentase Perdamaian Dan Perdamaian Yang Dilakukan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perdamaian dan Perdamaian</p>	<p>Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Pembinaan dan Penyuluhan, Pengamanan, dan Pengawasan</p>	<p>Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat</p>	<p>Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</p>	<p>100 % 100 % 100 %</p>	<p>300 laporan 82 %</p>	<p>10.654.733.500</p>	<p>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</p>	<p>Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perdamaian dan Perdamaian Melalui Penitipan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</p>	<p>300 laporan</p>	<p>10.381.813.800</p>			
1 05 02 2.01 0017	<p>Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah</p> <p>Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum Yang Dapat Diselesaikan Persentase Perdamaian Dan Perdamaian Yang Dilakukan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perdamaian dan Perdamaian</p>	<p>Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perdamaian dan Perdamaian Melalui Penitipan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</p>	<p>Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat</p>	<p>Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</p>	<p>100 % 100 % 100 %</p>	<p>25 Laporan 82 %</p>	<p>12.503.821.300</p>	<p>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</p>	<p>Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perdamaian dan Perdamaian Melalui Penitipan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</p>	<p>25 Laporan</p>	<p>13.830.959.033</p>			
1 05 02 2.01 0017	<p>Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah</p> <p>Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum Yang Dapat Diselesaikan Persentase Perdamaian Dan Perdamaian Yang Dilakukan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perdamaian dan Perdamaian</p>	<p>Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perdamaian dan Perdamaian Melalui Penitipan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</p>	<p>Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat</p>	<p>Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</p>	<p>100 % 100 % 100 %</p>	<p>1 Laporan 82 %</p>	<p>12.301.500</p>	<p>PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)</p>	<p>Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perdamaian dan Perdamaian Melalui Penitipan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>12.500.000</p>			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi misi Walikota Makassar. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan RENJA mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Untuk lebih jelas Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARG ET AKHIR	RAAL I SASI CAPAI	PRAKI RAA N CAPAI	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	
							TARGET 2024	8	9	10				11	12	13				14
1	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																		
1	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN UMI																		
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik																	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA																		
			90 % 100 % 90 %																	
			11.834.819.812																	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Terperluhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			16 Dokumen																	
			211.410.100																	
			Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan publik																	
			SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR																	
			352.248.692																	
			Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan publik yang Sombere dan Smart																	
			SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR																	
			157.169.152																	
			Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan publik yang Sombere dan Smart																	
			SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR																	
			20.215.449																	
			Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan publik yang Sombere dan Smart																	
			SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR																	
			20.215.449																	
			Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan publik yang Sombere dan Smart																	
			SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR																	
			20.215.449																	

1.05.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.518.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	20.215.448	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	16.518.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	20.215.448	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.448.400	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	53.871.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	104.217.744	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	8.229.327.512			Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	11.100.878.429	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

1.05.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	7.647.517.312	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transparansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara pemerintahan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	10.461.249.517	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	308.160.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transparansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara pemerintahan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	353.519.039	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	180.000.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transparansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara pemerintahan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	180.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	11.178.700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transparansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara pemerintahan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	11.475.633	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21.705.300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transparansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara pemerintahan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	19.668.976	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pen yelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pen yelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	942.166.000		Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pen yelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	501.955.063	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.963.200	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pen yelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	7.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	400.520.500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pen yelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	130.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

1.05.01.2.07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transmansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan pemerintah publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terperluhnyanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	313.167.000			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transmansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan pemerintah publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.417.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transmansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan pemerintah publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	285.750.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transmansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan pemerintah publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperluhnyanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1	1.095.516.900			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transmansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan pemerintah publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.706.650	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transmansi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja pelayanan pemerintah publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	1.005.610.250	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	1.343.936.414	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	47.200.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	64.656.656	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2. 1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukuk Perda dan Perkada Persentase Gangguan Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum	100 % 100 % 100 %	33.511.812.620						27.107.820.142	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketertarikan Masyarakat	1	32.914.910.920			Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Masyarakat Kota Makassar	26.495.144.507	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	223.947.620	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Masyarakat Kota Makassar	122.276.332	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.004	Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	3.900.000.000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Masyarakat Kota Makassar	983.454.300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.02.2.01.005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindugan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindugan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1665 Orang	2.452.742.700	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Masyarakat Kota Makassar	643.355.041	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.008	Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Masyarakat Kota Makassar	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.015	Pencegahan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 laporan	10.654.733.500	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Masyarakat Kota Makassar	10.381.813.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.016	Penindakan Atas Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	25 Laporan	12.503.821.300	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2 Penguatan kinerja penyelenggara an pemerintah an dan pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Masyarakat Kota Makassar	13.830.959.033	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah										

BAB V

PENUTUP

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2024 ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang akan dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. yang masih mengacu pada arah kebijakan dan Sasaran Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026. Khususnya Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang kedalam beberapa Program diantaranya :

- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
- Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- Pembinaan Masyarakat dan kewaspadaan Dini
- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Keberhasilan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai Renja ini sangat Tergantung dari peran serta masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang memiliki sikap mental. tekad dan semangat. ketaatan. kejujuran dan disiplin sehingga akan tercermin pada kualitas dan Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Kesemuanya ini merupakan suatu mata rantai yang saling berkesinambungan. berkaitan dan saling mempengaruhi. sehingga keterpaduannya merupakan persyaratan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2024 yang pada pokoknya merupakan kelanjutan dari kegiatan 2023 dan mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2021–2026 serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Walikota.